BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Heuleut Kabupaten Majalengka, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Heuleut Kabupaten Majalengka dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan tetap berlangsungnya kegiatan operasional pengelolaan sampah, seperti penerimaan, pencatatan, pengangkutan, pemindahan, dan pemrosesan akhir sampah. Namun, berdasarkan analisis teori implementasi kebijakan George C. Edward III, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi keterbatasan sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengolahan sampah lanjutan. Pengelolaan sampah masih didominasi pola pemindahan dan pemrosesan akhir, sedangkan pemilahan dan pengolahan sampah organik maupun anorganik belum berjalan secara optimal. Dengan demikian, implementasi Perda telah dilaksanakan pada aspek operasional dasar, tetapi belum sepenuhnya mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat memiliki pengaruh terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 di TPA Heuleut Kabupaten Majalengka. Faktor pendukung meliputi keberadaan petugas yang menjalankan kegiatan operasional, tersedianya empat unit dump truck, satu unit mini pickup, dan satu unit excavator, serta adanya kegiatan pemilahan sampah secara manual oleh pemulung. Faktor-faktor tersebut memungkinkan kegiatan pengelolaan

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

sampah tetap berlangsung. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan biaya operasional, besarnya kebutuhan anggaran pengolahan sampah, terbatasnya armada dan alat berat, belum optimalnya fasilitas pengolahan lanjutan, pemilahan sampah yang masih dilakukan secara manual, serta kondisi infrastruktur jalan dan akses menuju TPA yang masih menjadi kendala. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menyebabkan kemampuan pengelola dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang terpadu masih terbatas.

3. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Heuleut Kabupaten Majalengka dalam perspektif *Fiqh Siyasah* pada dasarnya telah menunjukkan kesesuaian secara normatif dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah*), tanggung jawab pemerintah (*ulil amri*), dan pelestarian lingkungan, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Dari aspek *maslahah*, keberadaan pelayanan pengelolaan sampah merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan dan mencegah kemudaratan bagi masyarakat. Dari aspek *ulil amri*, pemerintah daerah telah menjalankan kewenangannya melalui pembentukan regulasi, penyelenggaraan pelayanan, serta pembinaan dan pengawasan. Sementara itu, dari aspek pelestarian lingkungan, pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA Heuleut masih memerlukan peningkatan karena pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan sampah belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, implementasi Perda tersebut perlu terus diperkuat agar tanggung jawab pemerintah tidak hanya terpenuhi secara administratif, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pihak-

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

pihak terkait dalam meningkatkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Heuleut Kabupaten Majalengka, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka, diharapkan dapat meningkatkan dukungan anggaran untuk pengelolaan sampah di TPA Heuleut, khususnya dalam pengadaan dan pemeliharaan sarana pengolahan, peningkatan kapasitas operasional, serta perbaikan infrastruktur pendukung. Pemerintah daerah juga perlu menyusun strategi pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tidak hanya berorientasi pada pemindahan dan pemrosesan akhir sampah, tetapi juga pada pengurangan dan pemanfaatan sampah secara berkelanjutan.
2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dan pengelola TPA Heuleut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengelolaan sampah melalui optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pemilahan dan pengolahan sampah organik maupun anorganik. Selain itu, diperlukan evaluasi operasional secara berkala, pemeliharaan armada dan alat berat, serta penguatan koordinasi antarpetugas agar pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.
3. Bagi masyarakat Kabupaten Majalengka, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah, khususnya melalui pengurangan penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah, pemilahan sampah sejak dari sumbernya, serta penerapan prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R). Partisipasi masyarakat tersebut penting untuk mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA Heuleut dan mendukung terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

4. Bagi pengembangan kajian ilmiah selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian pada tahapan pengelolaan sampah dari sumber hingga pemrosesan akhir, menggunakan pendekatan atau teori implementasi kebijakan lainnya, serta mengembangkan analisis *Fiqh Siyasah* yang berkaitan dengan kemaslahatan, tanggung jawab pemerintah, dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan alternatif penyelesaiannya.
5. Bagi pengembangan kebijakan pengelolaan sampah berbasis *Fiqh Siyasah*, diharapkan pemerintah daerah dapat menjadikan prinsip kemaslahatan (*maslahah*), tanggung jawab pemerintah (*ulil amri*), dan pelestarian lingkungan sebagai landasan dalam merumuskan strategi pengelolaan sampah. Kebijakan tersebut perlu diarahkan pada pemenuhan kepentingan masyarakat, pencegahan kemudaratan lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 dapat semakin mencerminkan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON